

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam berbagai fenomena pasar saat ini, bahwa kebutuhan barang pokok, khususnya gula, telur, minyak curah serta beras sangat tergantung kepada penawaran dan permintaan.¹ Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan tingkat fluktuasi harga dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Langkah konkrit dari pemegang kebijakan (pemerintah) tentu berdasarkan berbagai pertimbangan. Diantaranya mempertimbangkan tingkat daya beli masyarakat, akibat kenaikan harga BBM, atau dari beberapa faktor seperti, musim kemarau, bencana alam, dan lain-lain. Dalam hal ini kebijakan pemerintah diperlukan untuk mencari solusi bagi kesetabilan harga pasar. Disamping itu juga, harus ada kebijakan yang jelas tentang batasan harga dipasaran. Baik itu harga eceran tingkat atas (*ceiling price*), atau harga eceran tingkat bawah (*floor price*) untuk sesuatu komoditi kebutuhan barang pokok.²

Namun kenyataannya sistem ekonomi kita lebih banyak dikendalikan oleh sistem kapitalis liberalis, dimana yang dikejar hanyalah kepuasan individu, tanpa memperhatikan kemaslahatan yang lainnya. Dominasi sistem ekonomi kapitalis liberalis dalam tatanan ekonomi nasional sangat terlihat ketika terjadi kenaikan harga, atau kelangkaan barang akibat monopoli atau persaingan yang tidak fair, menimbulkan gejolak harga yang tidak terkendali sehingga keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.³

Fenomena yang terjadi di Indonesia, setiap menjelang Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri/Lebaran, Hari Raya Idul Adha, Natal, maupun Tahun Baru selalu terjadi kenaikan harga-harga, mulai dari harga tiket pesawat, harga pakaian,

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

³ Abdullah, Piter, Arminda Alisyahbana, Nurry Effendy and Budiono. *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan, Bank Indonesia. 2002).

sampai dengan harga perhiasan. namun kenaikan harga yang paling terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah adalah kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako). Gejala kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut sudah merajalela di sejumlah kota di Indonesia, terutama kota-kota besar, dan juga mulai merambah desa-desa. kenaikan harga menjelang hari raya seolah-olah telah menjadi tradisi yang sulit sekali dihilangkan. Belum lagi akibat ulah penimbun barang atau spekulasi yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.⁴

Komoditas sembako menjadi salah satu penentu tingginya inflasi, menurut data Bank Indonesia, bahkan pangan penyebab inflasi pada waktu menjelang dan selama Ramadhan, seperti beras, cabe merah, daging, kacang panjang, udang basah, daging ayam ras, kentang, tahu, tempe. Pada tahun 2017 bawang merah menyumbang inflasi paling tinggi dari sekian banyak barang pangan, yaitu sebesar 0,51 persen dan terendah disumbang oleh kentang sebesar 0.07 persen. Setiap tahun tingkat inflasi komoditas pangan tidak tetap, temporer dan bersifat kejutan. Pada tahun 2016 beras menyumbang sebesar 0,05 persen, pada tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 0,11 persen.⁵

Selama lima tahun terakhir pada hari pertama hingga kelima bulan Ramadhan, harga sembako selalu naik. Kemudian hari keenam hingga ke-20 akan stabil dan mulai memasuki tanggal 21 Ramadhan harga sembako akan naik lagi dan puncaknya pada H-2 Lebaran.⁶

Hal tersebut disebabkan para pengusaha selalu ingin memanfaatkan momentum menjelang Lebaran untuk mengambil keuntungan karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat. Apalagi pengusaha sudah sangat lihai untuk mengatur agar harga dagangan mereka tetap memberikan margin lebih.

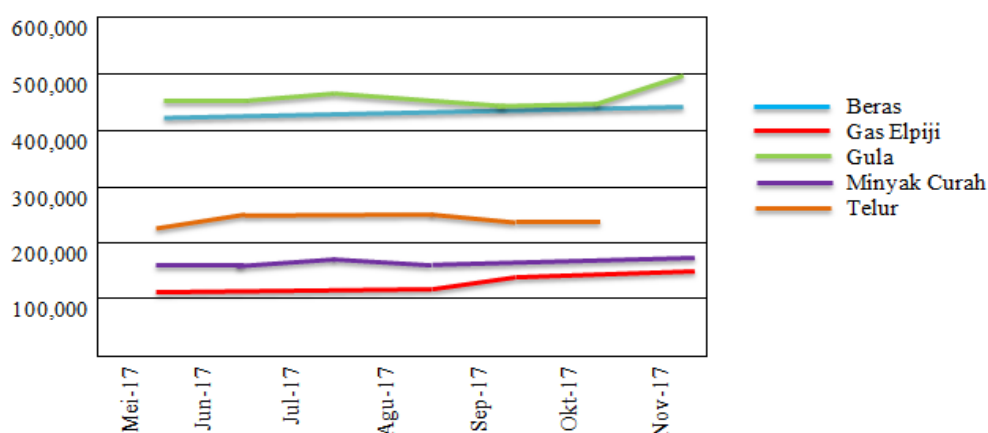
Apakah pemerintah bisa mengendalikan hal itu? pemerintah bisa campur tangan jika ditemukan kondisi stok di pasar langka dan terjadi kenaikan harga

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

⁵ Achmad Munawir, "Selamat Tinggal Inflasi". <http://ekonomi.kompasiana.com> (Jakarta, Diakses pada 12 Desember 2015)

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

yang tidak wajar. Oleh karena itu, pedagang akan pintar memainkan dan mengatur stok dengan cantik. Pedagang bisa memainkan kondisi pasar dan berusaha memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa stok barang terpenuhi, sehingga pemerintah tidak melakukan operasi pasar.⁷ Kondisi seperti ini memungkinkan pedagang memiliki “kuasa” penuh untuk menentukan kenaikan harga barang di pasar. Harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak curah, gas dan telur mengalami fluktuasi harga khususnya mulai bulan Mei-November 2017.⁸ Seminggu menjelang bulan Ramadhan hingga sebulan pasca lebaran harga beberapa kebutuhan pokok umumnya mengalami kenaikan.⁹ Disamping itu, kenaikan harga BBM juga berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut.¹⁰ Hal ini dapat dilihat pada bulan November 2017 dimana pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan tersebut, harga kebutuhan pokok kembali mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya, fluktuasi harga kebutuhan pokok tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1.
Grafik Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok¹

Keterangan grafik: Data diambil pada tahun 2017. Kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak curah, gas dan telur mengalami fluktuasi harga khususnya

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga.

⁹ Syafrijal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers. 2018).

¹⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi kesebelas) jilid 2, (Jakarta : GraMedia, 2005).

mulai bulan Mei-November 2017. Kebutuhan pokok seperti gula, telur dan minyak curah sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan pasar khususnya menjelang bulan Ramadhan hingga sebulan pasca Idul Fitri. Sedangkan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan gas elpiji lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM.

Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya, akan tetapi semua kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan realita kehidupan.¹¹ Nilai-nilai ke-Islam-an ini bersifat universal, berlaku untuk seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar. Secara normatif, tatanan kehidupan pemerintah dan masyarakatnya hendaknya berpijak dan mencerminkan nilai-nilai Islam, terutama dalam bidang maaliyah dengan sesama manusia. Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang bukan miliknya, melakukan transaksi dengan riba, penipuan, penimbunan, dsb. Akan tetapi Islam memerintahkan untuk memakan-makanan yang di dapat dengan cara yang halal, perdagangan yang saling menguntungkan, dan transaksi antaradhin, yang berujung kepada kebahagiaan (falah) baik di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa:4:29).*¹²

Wahbah Juhaili dalam tafsirnya Al-Munir¹³, menafsirkan ayat tersebut dalam konteks ekonomi, ayat tersebut menyebutkan beberapa prinsip penting

¹¹ Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani, 2018.

¹² Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Duta Ilmu, tt) 108

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al -Syar'iah wa Al-Munhaj* (Dimasyq: Daar Al-Fiqr, Beirut Daar Al-Fiqr Al-Mu'ashir, 1418 H-1998 M), Juz 5, 31-32

dalam ekonomi. Pertama adalah kata **أَمْوَالُكُمْ** yang dimaksud adalah harta miliknya dan juga harta orang lain. Semua harta yang beredar dalam masyarakat adalah untuk umat. Kedua adalah **الْبَاطِلِ** yakni mencari harta dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah seperti riba, judi, merampas, mencuri dan yang lainnya hukumnya haram. Menurut Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri yang dimaksud **الْبَاطِلِ** adalah apa-apa yang diambil tanpa ada pengganti, mencakup didalamnya semua yang diambil dengan cara akad yang rusak, seperti jual beli barang yang tidak memiliki nilai dan tidak bermanfaat. Maka barang siapa melakukan jual beli dengan cara tersebut kemudian mengambil harga darinya, maka harga barangnya menjadi haram. Ketiga **عَنْ تَرَاضٍ** *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ* Allah SWT,¹⁴ memerintahkan untuk memakan harta dengan cara jual beli yang halal yang dilandaskan pada prinsip saling ridha sesuai dengan ketentuan syariah. Islam juga menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya dalam istilah fiqihnya dikenal *haqqal ghair muhafazun 'alaihi syar'an*.¹⁵

Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli inilah Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan kebijakan dalam penentuan harga (price intervention)¹⁶ atau dalam *Fiqh Islam* dikenal dengan istilah *Tas'ir* yaitu penetapan harga atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penentuan harga dengan alasan maslahat. Khulafaur Rasyidin pun pernah melakukan kebijakan dalam penentuan harga yaitu ketika Umar bin Khatab r.a. mendatangi pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta' menjual anggur kering pada harga dibawah harga pasar. Umar langsung menegurnya: “Naikan hargamu atau tinggalkan pasar kami.”¹⁷

¹⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Shahih al-Bukhari, (Riyadh: Darus Salam dalam Maktabah asy-Syamilah) 3.2 1419 H

¹⁵ Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al-Marighi*, (Mesir: Syirkat Maktabah wa Mathba'ah al-Halabi. 1998).

¹⁶ Indri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008).

¹⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Ed.5 Cet.6,

Teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam suatu persaingan sempurna. Hanya saja, dalam perekonomian modern teori, dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidak sempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan yaitu intervensi dalam menetapkan harga pada kondisi di atas.¹⁸ Ada beberapa faktor yang membolehkan kebijakan (kebijakan) harga antara lain:

1. Kebijakan harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit maxi* sekaligus pembeli dalam hal *utiliti maxi*.
2. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli.
3. Kebijakan harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Dalam khazanah keilmuan Islam para ulama berbeda pendapat terhadap hal ini, salah satunya Abu Yusuf.¹⁹

Pertengahan abad ke-8 M merupakan masa peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah.²⁰ Masa ini merupakan masa konflik internal umat Islam sehingga suasana tidak kondusif bagi berbagai aspek kehidupan. Hal ini berarti dunia Islam tengah mengalami masa kesulitan atau

¹⁸ Aziz, Iwan Jaya. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya*. (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI. 1994).

¹⁹ Syahriza Rahmi, *Hadits-Hadits Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015)

²⁰ Janwari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2016)

kemunduran sesaat. Aktivitas Ilmiah sebagai bagian penting dalam perjalanan umat Islam juga mengalami kemandekan karena suasana yang tidak kondusif itu.

Namun demikian, di dalam suasana yang mencekam seperti itu ternyata masih ditemukan secercah harapan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Adalah Abu Yusuf, seorang ulama besar yang masih bisa konsisten dengan aktivitas Ilmiahnya di tengah-tengah suasana yang tidak kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Ulama yang hidup di dua masa kedinastian ini Umayyah dan Abbasiyah telah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi dunia Islam.²¹

Karya terbesar dari Abu Yusuf adalah *Kitab Al-Kharaj* telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Secara komprehensif, Abu Yusuf telah menyajikan pemikiran ekonomi dalam kerangka makro. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini dalam tataran teknis, telah memberikan regulasi yang pasti bagi para penguasa dizamannya, sedangkan secara teoritis, pemikiran ekonomi Abu Yusuf telah menjadi referensi dalam pengembangan ekonomi Islam.²²

Meskipun karya Abu Yusuf itu merupakan pesanan dari penguasa saat itu, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, tetapi dalam kajiannya tidak menunjukkan subjektivitasnya. Hal ini bisa dilihat dari kemandiriannya ketika pendapatnya berbenturan dengan tradisi ekonomi yang berlaku pada masa itu, termasuk kebijakan penguasa. Oleh karena itu, buku itu dibuat atas pesanan penguasa, tetapi tetap menunjukkan objektivitasnya.²³

Sehubungan dengan hal tersebut, deskripsi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dengan merujuk pada karyanya menjadi suatu yang signifikan. Buku yang ditulis dengan menggunakan pendekatan ekonomi makro ini bisa dijadikan sebagai referensi utama dalam mengkaji pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Selain itu, buku kitab *Al-Kharaj* ini merupakan sebuah buku klasik yang telah mampu

²¹ Januari Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.2016)

²² Syahriza Rahmi, *Hadits-Hadits Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015)

²³ Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung. 2015)

mengonvergensi antara kajian teoritis dengan tataran implementasi ekonomi pada zamannya.

Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, Abu Yusuf membenahi mekanisme ekonomi terlebih dahulu. Abu Yusuf memiliki gagasan untuk membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Abu Yusuf memandang bahwa masyarakat memiliki hak dalam campur tangan ekonomi, begitu pula sebaliknya pemerintah tidak memiliki hak bila ekonomi tidak adil.²⁴

Membangun sistem ekonomi dan politik yang transparan. Transparan ini terwujud dalam peran dan hak asasi masyarakat dalam menyikapi tingkah laku dan kebijakan ekonomi, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kehendak bebas dan berbuat baik.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga.²⁵ Beliau lebih mengikuti mekanisme pasar dan bersandar pada dalil bahwa harga sesungguhnya sudah merupakan kehendak Allah, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعَرَ غَلَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّ السَّعَرَ قَدْ غَلَا فَوُظِفَ وَظِيفَةُ نَفُومٍ عَلَيْهَا. فَقَالَ ﷺ إِنَّ الرُّحَصَ وَالْغَلَاءَ بِيَدِ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نُجَوِّزَ أَمْرَ اللَّهِ وَقَضَاءَهُ ﴿

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili dari Hikam bin 'Utaybah yang menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW harga pernah melambung tinggi, maka masyarakat mengadu kepada Rasulullah harga menjadi mahal, maka mereka meminta Rasulullah membuat ketentuan untuk menetapkan harga. maka berkata Rasulullah: ("Bahwasanya murah dan mahalnya suatu harga adalah ketentuan Allah, tidaklah kita dapat mencampuri perkara Allah dan ketetapan-Nya.")²⁶

²⁴ Syahriza Rahmi, *Hadits-Hadits Ekonomi*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015).

²⁵ Abu Yusuf, *Kitab Kitab al-kharraj*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1399 H-1979 M).

²⁶ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharra*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1399 H-1979 M), 49.

وَحَدَّثَنِي ثَابِتُ أَبُو حَمْزَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
 قَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ السَّيْعَرَ قَدْ غَلَا ، فَسَعَرَ لَنَا سَيْعَرًا. فَقَالَ لَهُ أَنْ
 السَّيْعَرَ غَلَاؤُهُ وَرُخْصُهُ بِنِدَائِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ جُنْدِي مُظْلِمَةٌ
 يَطْلُبُنِي بِهَا ﴿

Telah menceritakan kepadaku Tsabit Abu Hamzah Al-Yamani dari Salim bin Abi Ja'ad telah mengatakan bahwa masyarakat mengadu kepada Rasulullah SAW: "Wahay Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami, beliau lalu berkata ("Sesungguhnya tinggi dan rendahnya suatu harga ketentuan Allah, dan aku ingin ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seorangpun yang meminta pertanggung jawaban dariku karena kezaliman.")²⁷

Begitu pun dengan Yahya Bin Umar, ulama ini mempunyai konsep bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat
2. Para pedagang melakukan praktik siyasah al ighraq atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.

Abu Yusuf mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram , menurutnya pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk ikhtikar dan dumping.

Tetapi walaupun ada persamaan Antara Yahya Bin Umar dengan Abu Yusuf tetapi ada perbedaan perbedaan dasar pemikiran di antara ulama-ulama tersebut yaitu dasar pemikirannya adalah ikhtikar dan dumping, untuk meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga lebih rendah daripada yang berlaku dipasar, sementara dasar pemikiran Abu yusuf adalah harga menurut Abu Yusuf dapat saja harga-harga tetap mahal ketika Persediaan barang melimpah sementara harga akan murah walaupun persediaan berkurang. Pernyataan Abu

²⁷ Yusuf, *Kitab al-kharraj*, 49

Yusuf ini mengkritisi pendapat umum yang menyatakan harga berbanding terbalik dengan supply dan berbanding lurus dengan demand.

Berbeda dengan konsep Ibnu Thaimiyah, yang memperbolehkan pemerintah melakukan campur tangan dalam penentuan harga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh “Konsep Abu Yusuf Tentang Penentuan Harga Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia”.²⁸

B. Perumusan Masalah Penelitian

Abu Yusuf menentang pemerintah yang menetapkan harga.²⁹ Beliau lebih mengikuti mekanisme pasar dan bersandar pada dalil bahwa harga sesungguhnya sudah merupakan kehendak Allah.

Tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan sebagai identifikasi permasalahan yang sudah diuraikan, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Abu Yusuf tentang penentuan harga?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga?
3. Bagaimana relevansinya antara konsep Abu Yusuf dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui konsep Abu Yusuf tentang penentuan harga
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga
3. Untuk mengetahui relevansinya antara konsep Abu Yusuf dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga

²⁸ Abu Yusuf, *Kitab Kitab al-kharraj*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1399 H-1979 M).

²⁹ Abu Yusuf, *Kitab Kitab al-kharraj*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1399 H-1979 M).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis dapat menjadi referensi bagi peneliti yang memiliki minat besar terhadap kajian tentang kebijakan pemerintah dalam penentuan harga menurut pandangan Islam.
2. Secara praktis dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan dalam mengambil langkah khususnya dalam hal kebijakan terhadap harga yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi rakyat.³⁰

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam penentuan harga,³¹ pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Namun, secara umum penelitian ini masih bersifat Parsial, penelitian tersebut di antaranya membahas khusus tentang kebijakan pemerintah dalam penentuan harga, Pemikiran Abu Yusuf dalam bidang ekonomi yaitu mekanisme pasar terutama dalam penentuan harga.³²

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian dari Shiddiq Al-Jawi yang dituangkan dalam Tesis berjudul *at-Tas'ir*³³ (Kebijakan Pemerintah dalam Penentuan Harga) (2015 M). Penelitian yang dituangkan dalam tesis tersebut terutama membahas tentang berbagai definisi *at-Tas'ir* menurut para ulama beserta tinjauannya. Fokus kajian dalam penelitian tersebut berbeda dengan fokus kajian yang akan dilakukan dalam tesis ini, karena fokus kajian tesis ini lebih spesifik membahas tentang kebijakan harga (*at-Tas'ir*) menurut pokok pandangan dari ulama terkenal yaitu Abu Yusuf serta bagaimana relevansinya antara konsep Abu Yusuf dan kebijakan ekonomi Indonesia dalam penentuan harga.

³⁰ Syafrizal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers. 2018).

³¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi kesebelas) jilid 2, (Jakarta: GraMedia, 2005).

³² Sharif Chaudhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Group, 2012).

³³ Shiddiq Al-Jawi, *at-Tas'ir*, (Yogyakarta: 2011).

Selanjutnya, kajian pustaka ini juga menentukan kajian tentang sosok dan pemikiran dari ulama yang diteliti dalam tesis ini, yaitu: sosok maupun pemikiran Abu Yusuf. Tesis berjudul: *al-Qadhi Abu Yusuf wa Kitabuhu al-Kharraj*, karya Mahmud Hadhar Ismail Sulaiman (2013 M)³⁴ membahas sosok Abu Yusuf yang merupakan mufti pada zaman kekhalifahan Harun al-Rasyid, dan studi keritis terhadap hadits-hadits dalam Kitab AL-Kharraj yang ditulis oleh Abu Yusuf. sementara itu, peneliti dalam tesis kajian tas'ir ini secara khas akan membahas latar belakang pemikiran Abu Yusuf dan mengkaji lebih dalam hadits riwayat dari ulama ini tentang kebijakan pemerintah dalam harga.

Selain kajian pustaka terhadap pemikiran ulama tersebut, kajian pustaka ini juga menjaring sejumlah pustaka yang membahas masalah perekonomian kontemporer yang terkait masalah harga khususnya dalam lingkup perekonomian Indonesia. Peneliti dari Andi Irawan yang berjudul: *Analisis Perilaku Instabilitas, Pergerakan Harga, Employment, dan Investasi di dalam sektor Pertanian Indonesia: Aplikasi Vector Error Correction Model* (2005 M).³⁵ Membahas tentang fluktuasi harga, khususnya harga di bidang pangan³⁶ yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan minat investasi, khususnya investasi terhadap sektor Pertanian. Pada pihak lain, peneliti dari Ari A. Perdana yang berjudul: *Peranan "Kepentingan" Dalam Mekanisme Pasar dan Penentuan Kebijakan Ekonomi di Indonesia* (2018 M)³⁷ membahas kondisi perekonomian di Indonesia yang terkait pada sistem ekonomi yang berbasis pada mekanisme pasar secara konvensional, namun dalam prakteknya tidak pernah dijalankan secara sungguh-sungguh. Oleh karena dalam praktek perekonomian, modal

³⁴ Mahmud Hadhar Ismail Sulaiman, *al-Qadhi Abu Yusuf wa Kitabuhu kitab al-kharraj*, (Malaysia. 2013).

³⁵ Andi Irawan, *Analisis Perilaku Instabilitas, Pergerakan Harga, Employment, dan Investasi di dalam sektor Pertanian Indonesia: Aplikasi Vector Error Correction Model*, (Bogor. 2005).

³⁶ Andi Irawan, *Analisis Perilaku Instabilitas, Pergerakan Harga, Employment, dan Investasi di dalam sektor Pertanian Indonesia: Aplikasi Vector Error Correction Model*, (Bogor. 2005).

³⁷ Ari A. Perdana, *Peranan "Kepentingan" Dalam Mekanisme Pasar dan Penentuan Kebijakan Ekonomi di Indonesia*, (Bandung. 2001).

memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, meskipun peran tersebut masih terbatas.³⁸

Oleh karena itu terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitianterdahulu dan penelitianyang akan dilaksanakan. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama mengkaji kebijakan pemerintah dalam menentukan harga tetapi perbedaannya penelitianyang akan dilaksanakan ini, lebih spesifik yaitu kebijakan ekonomi pemerintah dalam menentukan harga menurut pandangan Abu Yusuf dan relevansinya.

Hal tersebut akan digarap secara deduktif.³⁹ Artinya ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai landasan awal lalu diturunkan darinya teori-teori yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, maka secara normatif, sudah sepantasnya bila tatanan kehidupan pemerintah dan masyarakat di negara Indonesia berpijak dan mencerminkan nilai-nilai Islam yang bersifat universal, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.⁴⁰

Al-Qur'an dan As-Sunah menjelaskan tentang Ekonomi Islam yang bersifat dinamis menurut dimensi ruang dan waktu karena Islam adalah *rahmatan lil alamin*. Kekuatan akal manusia era globalisasi ekonomi dewasa ini mampu mengkaji hubungan antara bangsa dan seluruh negara dalam transaksi yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunah, serta dengan ijtihad pemikir-pemikir muslim untuk aspek ekonomi yang belum di spesifikasikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Islam mengajarkan konsep rezeki dan berkah yang melampaui hukum mutu manusia. Islam juga mengajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak keterlaluhan dalam memenuhi kehendak dan agar tidak mengambil hak orang lain. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi pemerintah Indonesia untuk

³⁸ Syafrijal, *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers. 2018).

³⁹ Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani, 2018).

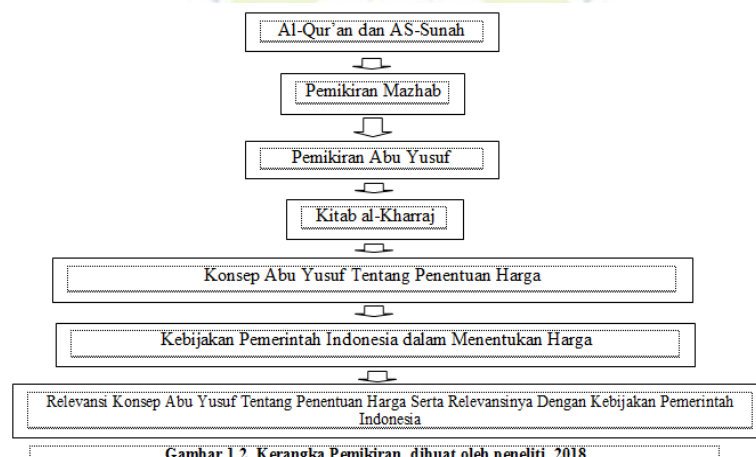
⁴⁰ Al-Qur'an Al-Karim

mengimplementasikan pola-pola ekonomi Syariah dalam melakukan kebijakan dalam penentuan harga.⁴¹

Dalam khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang ekonomi, banyak ulama dan pakar ekonomi Islam yang memiliki konsep-konsep tentang kebijakan terhadap harga. Diantaranya adalah Abu Yusuf.⁴² Ulama ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Islam pada era modern ini.⁴³

Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat sekali apabila kita membahas konsep pemikiran ulama tersebut khususnya dalam hal kebijakan pemerintah dalam penentuan harga sehingga dapat menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan terhadap harga barang di negara ini.

Demikian kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini. Selanjutnya secara ringkas dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



⁴¹ Adiwarman Karim, *Ekonom Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press. 2014).

⁴² Abu Yusuf, *Kitab al-kharraj*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1399 H-1979 M)

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Makhdal Liddirsa' As-Syariah Al-Islamiyah*, (Beirut: Musassasah Ar-Raisalah, 1417 H. 1996 M.).